

# BAB 25

## Indikator Sosial Budaya dan Keamanan

---

Berdasarkan kondisi Eksiting dan Program Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun, maka kondisi sektor sosial yang diinginkan selama lima tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut: (1) terkendalinya tingkat kelahiran, meningkatnya derajat kesehatan dengan terbangunnya prasarana dan sarana kesehatan secara merata; (2) meningkatnya angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah dengan tersedianya prasarana dan sarana pendidik, tenaga pendidik dan kependidikan, keputakaan umum, dan kemudahan dalam menjalankan program wajib belajar sembilan tahun sampai 12 tahun; (3) terbangunnya infrastruktur strategis (di antaranya jalan, stasiun petikemas di Durian Remuk, terminal/subterminal agribisnis, jaringan pengairan, dan sarana komunikasi) untuk mengembangkan *agropolitan district* dan *agropolitan center* menjadi kesatuan jaringan ekonomi regional terpadu; (4) meningkatnya pelayanan publik untuk menciptakan rasa aman, damai, dan kemudahan dalam berusaha dan mendapatkan pekerjaan bagi masyarakat.

Tolok ukur dari tercapainya wujud yang diinginkan tersebut adalah pada akhir tahun 2010 tercapainya indeks angka harapan hidup 0,71; indeks angka melek huruf 0,90; indeks rata-rata lama sekolah 0,73; dan indeks konsumsi perkapita riil 0,87. Dengan demikian akan mencapai indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 0,81 atau masuk ke dalam status pembangunan manusia tinggi (menurut UNDP nilai IPM < 50 termasuk rendah, 50 > IPM ≤ 66 menengah bawah, 66 < IPM < 80 menengah atas, dan > 80 tinggi).

### I. Indikator Sosial

#### A. Penanggulangan Masyarakat Miskin

1. Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ;
2. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu;
3. Terpenuhinya standard pelayanan kesehatan yang lebih baik;

4. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan merata;
5. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha;
6. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat;
7. Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin;
8. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan terjaganya kualitas lingkungan hidup;
9. Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal atas tanah;
10. Terjaminnya rasa aman dan damai;
11. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan.
12. Menurunnya jumlah desa tertinggal;

**B. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan**

1. Meningkatnya taraf pendidikan penduduk, dengan indikator APK dan APM yang meningkat;
2. Meningkatnya kualitas pendidikan ;
3. Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan ;
4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan

**C. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan**

1. Mencapai Kabupaten Musi Rawas Sehat 2008 dan Indonesia Sehat 2010
2. Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian ;
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ;
4. Meningkatnya umur harapan hidup (UHH) dari 62,9 tahun menjadi 67,9 tahun;
5. Menurunnya angka kematian bayi menjadi 40 per 1.000 kelahiran hidup;
6. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 477 menjadi 125 per 100.000 kelahiran hidup;
7. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di atas 15%.

**D. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama**

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Agama serta Kehidupan Beragama;
2. Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik. Upaya ini juga ditujukan pada anak peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama dapat ditanamkan sejak dini pada anak-anak;
3. Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing - masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya;
5. Meningkatnya peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen pembangunan dalam rangka meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi berbagai krisis;
6. Peningkatan Kerukunan antar umat Beragama.

**E. Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial**

1. Meningkatnya aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar dan peluang-peluang mengakses pembangunan, khususnya di kawasan-kawasan yang akan dikembangkan menjadi Kawasan Agropolitan;
2. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
3. Meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
4. Meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial;
5. Tersusunnya sistem perlindungan sosial Daerah;

6. Meningkatnya keserasian kebijakan kesejahteraan sosial;
7. Terjaminnya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial;
8. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

**F. Pembangunan Kependudukan, Pemuda dan Olahraga**

1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas ditandai dengan:
  - a. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan;
  - b. Meningkatnya peserta KB laki-laki;
  - c. Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang efektif serta efisien;
  - d. Meningkatnya usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun;
  - e. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh-kembang anak;
  - f. Meningkatnya jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif;
  - g. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
2. Meningkatnya keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan,
3. Meningkatnya keserasian berbagai kebijakan pemuda;
4. Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan;
5. Meningkatnya keserasian berbagai kebijakan olahraga;
6. Meningkatnya kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat serta prestasi olahraga.

**G. Ketenagakerjaan**

1. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka;
2. Meningkatnya lapangan kerja di segala bidang;
3. Terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan, akibat berkembangnya kawasan Agropolitan;

## **II. Indikator Budaya**

1. Meningkatnya perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
2. Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat dan berbudaya;
3. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya;
4. Meningkatnya kreasi di bidang seni dan budaya lainnya;
5. Meningkatnya kesadaran sejarah dalam kehidupan bermasyarakat ;
6. Meningkatnya pengelolaan industri budaya;
7. Meningkatnya inventarisasi dan dokumentasi warisan budaya;
8. Meningkatnya perlindungan, penghargaan terhadap pelaku budaya daerah dan hasil karya budaya daerah dari pelanggaran hak cipta;
9. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, yang dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas;
10. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
11. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat;
12. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;
13. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan daerah, dan tidak bertentangan peraturan di atasnya.
14. Meningkatnya sumberdaya manusia yang profesional dan pelayanan di bidang kebudayaan;
15. Meningkatnya peranserta masyarakat dan UKM dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan daerah;
16. Meningkatnya perlindungan terhadap peninggalan sejarah dan kepurbakalaan;
17. Meningkatnya kerjasama interdaerah di bidang kebudayaan.

## **III. Indikator Ketertiban dan Keamanan**

1. Terciptanya sistem hukum yang adil, konsekwen dan tidak diskriminatif
2. Terjamimnya konsistensi seluruh peraturan
3. Terciptanya kelembagaan peradilan dan penegakkan hukum yang berwibawa, bersih, dan profesional.

4. Menurunnya angka kriminalitas.
5. Terciptanya ketertiban umum dan rasa aman bagi masyarakat.

Secara menyeluruh rasio penduduk laki-laki dengan perempuan di Kabupaten Musi Rawas adalah 101,00. Ini berarti bahwa dari 100 penduduk perempuan terdapat 101,00 penduduk laki-laki. Sedangkan rasio ketergantungan (*dependency ratio/DR*), yaitu rasio antara jumlah penduduk yang berumur 0 –14 tahun ditambah jumlah penduduk yang berumur  $\geq 60$  tahun dengan jumlah penduduk yang berusia 15 – 29 tahun dikalikan 100. Hasil perhitungan menunjukkan DR 71.11 yang bermakna setiap penduduk usia produktif harus menanggung 71,11 penduduk usia tidak produktif. Nilai DR ini termasuk dalam Kategori berat, seperti dijelaskan Pollard *et al.* (1974) bahwa nilai DR 0 – 30 termasuk kategori ringan, 31 – 60 termasuk kategori sedang dan  $> 60$  termasuk kategori berat.

Dengan luas wilayah 1.236.582,66 ha , maka kepadatan penduduk di Kabupaten Musi Rawas adalah 37,7 jiwa/km<sup>2</sup>. Ditinjau dari klasifikasi kepadatan penduduk, Kabupaten Musi Rawas tergolong daerah yang berpenduduk tidak padat (Undang-undang Nomor: 56/PRP/1960 membagi empat klasifikasi kepadatan penduduk, yaitu: tidak padat, dengan tingkat kepadatan 1 – 50 jiwa/ km<sup>2</sup>; kurang padat antara 51 – 250 jiwa/ km<sup>2</sup>; cukup padat 251 – 400 jiwa/ km<sup>2</sup>; dan sangat padat dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/ km<sup>2</sup>).

Secara keseluruhan jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Musi Rawas berjumlah 485 unit, yang terdiri dari Sekolah Dasar (SDN/S) berjumlah 418 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMPN/S) berjumlah 51 unit dan Sekolah Menengah Umum (SMUN/S) berjumlah 16 unit.

Secara umum semua kecamatan telah dilengkapi oleh sarana pendidikan SD dan SMP, terkecuali untuk SMU hanya terdapat di beberapa kecamatan saja. Lebih jelasnya ketersediaan sarana pendidikan di Kabupaten Musi Rawas disajikan pada Tabel 25.1

**Tabel 25.1**  
**Jumlah Sekolah Dirinci Per Kecamatan**  
**Dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2003**

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah			Jumlah Sekolah
		SDN/S	SMPN/S	SMUN/S	
1.	Rawas Ulu	24	2	1	27
2.	Rupit	23	2	2	27
3.	BKL Ulu Terawas	39	4	-	43
4.	Muara Beliti	30	2	2	34
5.	Tugumulyo	32	6	3	41
6.	Jayaloka	26	3	2	31
7.	Muara Kelingi	51	5	2	58
8.	Muara Lakitan	31	5	1	38
9.	Megang Sakti	32	6	1	39
10.	Rawas Ilir	20	3	1	24
11.	Karang Dapo	11	2	-	13
12.	Karang Jaya	18	2	-	20
13.	Purwodadi	13	2	-	15
14.	BTS Ulu	26	3	1	30
15.	Nibung	16	2	-	18
16.	Selangit	16	1		17
17.	Ulu Rawas	10	1		11
<i>Jumlah</i>		418	51	16	485

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Musi Rawas, 2004

Dilihat dari tahapan kesejahteraan penduduk Tahun 2003 menunjukkan bahwa jumlah keluarga prasejahtera (pra-KS) karena alasan ekonomi 25.252 keluarga dan bukan alasan ekonomi 11.077 keluarga bukan alasan ekonomi. Selanjutnya jumlah keluarga sejahtera tahap I (KS-I) karena alasan ekonomi 19.299 keluarga dan bukan alasan ekonomi 15.062 keluarga.

Persebaran prasarana kesehatan bahwa semua kecamatan di Musi Rawas telah memiliki Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, namun di Kabupaten Musi Rawas belum terdapat Rumah Sakit yang Representatif. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Musi Rawas 22 unit dan Puskesmas Pembantu 122 unit. Selain itu di Kabupaten Musi Rawas terdapat sembilan unit Balai Pengobatan, satu unit Klinik Bersalin dan 471 Posyandu. Untuk mendukung pelayanan kesehatan di Kabupaten Musi Rawas terdapat 24 orang Dokter Umum yang tersebar di hampir semua kecamatan, kecuali Kecamatan Selangit, tiga orang Dokter Gigi dan 208 orang Bidan.

Walaupun tidak terjadi tindakan terorisme di Kabupaten Musi Rawas, bukan berarti di daerah ini dapat dikatakan aman. Dilihat dari kasus tindak pidana yang terjadi Tahun 2003 mengindikasikan bahwa terjadi kasus tindak pidana biasa 471 perkara, penadahan 36 perkara, kesusilaan 552 perkara, terhadap ketertiban 167 perkara, perjudian 9 perkara, penculikan 167 perkara, pemerasan 193 perkara, penggelapan 127 perkara, penipuan 113 perkara, narkoba 288 perkara, perampokan 1170, dan penganiayaan 595 perkara.